

**PERBANDINGAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI KOREA SELATAN
TERKAIT ISU *COMFORT WOMEN***

(Skripsi)

Oleh

Satriana Rahma Dinanti
NPM 1716071078



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PERBANDINGAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI KOREA SELATAN TERKAIT ISU *COMFORT WOMEN*

Oleh

SATRIANA RAHMA DINANTI

Comfort women merupakan salah satu warisan masalah penjajahan Jepang di Korea Selatan, yang menjadi penghambat hubungan diplomatik antara kedua negara. Pemimpin Korea Selatan yaitu Presiden Park Geun-hye dan Presiden Moon Jae-in dihadapkan pada permasalahan *comfort women* yang menyangkut hubungan bilateral dengan Jepang. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kebijakan luar negeri Korea Selatan pada masa pemerintahan Presiden Park Geun-hye dan Presiden MoonJae-in terkait isu *comfort women*.

Penelitian ini menggunakan teori kebijakan luar negeri dan perbandingan politik dengan metode *single-country*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan perbandingan kebijakan luar negeri pada dua pemerintahan yang berbeda dan dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder berupa studi literatur, dokumentasi terkait, dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini menemukan kedua presiden menggunakan kebijakan yang berbeda. Pada masa pemerintahan Park Geun-hye ia berhasil mencapai kesepakatan terkait *comfort women* menggunakan pendekatan kebijakan *trust politic*, sementara pada pemerintahan Moon Jae-in, ia menerapkan kebijakan *dual track approach* dengan Jepang. Adapun hasil hari kebijakan yaitu diresmikannya yayasan hasil dari kesepakatan Presiden Park Geun-hye dan berakhir pada penolakan kesepakatan dan pembubaran yayasan pada masa kepemimpinan Presiden Moon. Faktor pendukung pada level domestik berupa karakteristik kepemimpinan dan peran organisasi masyarakat, serta faktor pendukung pada level internasional berupa pergeseran peran Amerika Serikat.

Kata kunci: *comfort women*, Korea Selatan, kebijakan luar negeri, perbandingan politik

ABSTRACT

**COMPARISON FOREIGN POLICY OF SOUTH KOREA TOWARD
COMFORT WOMEN ISSUE**

By

Satriana Rahma Dinanti

Comfort women is one of the legacy of the Japanese colonial problems in South Korea. which is an obstacle to diplomatic relations between the two countries. South Korean leaders, namely President Park Geun-hye and President Moon Jae-in, are faced with the issue of comfort women concerning bilateral relations with Japan. This study aims to compare South Korean foreign policy during the administrations of President Park Geun-hye and President Moon Jae-in regarding the issue of comfort women. This study uses the theory of foreign policy and political comparison with the single-country method. The study uses a qualitative approach to describe the comparison of foreign policy in two different governments and by using primary and secondary data sources in the form of literature studies, related documentation, and interviews. The results of this study found that the two presidents used different policies. During the Park Geun-hye administration, he succeeded in reaching an agreement regarding comfort women using a political trust policy approach, while in the Moon Jae-in government, he implemented a dual track approach with Japan. The results of the policy day were the inauguration of the foundation resulting from the agreement of President Park Geun-hye and ending in the rejection of the agreement and the dissolution of the foundation during the leadership of President Moon. Supporting factors at the domestic level in the form of leadership characteristics and the role of community organizations, as well as supporting factors at the international level in the form of a shift in the role of the United States.

Keywords: comfort women, South Korea, foreign policy, comparative politics

**PERBANDINGAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI KOREA SELATAN
TERKAIT ISU *COMFORT WOMEN***

Oleh

Satriana Rahma D

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **PERBANDINGAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI
KOREA SELATAN TERKAIT ISU
COMFORT WOMEN**

Nama Mahasiswa : **Satriana Rahma Dinanti**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1716071078**

Jurusan : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP 19600416 198603 2 002


Astiwi Inayah, S.IP., M.A.
NIP 19910502 202012 2 020

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional


Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP 19600416 198603 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

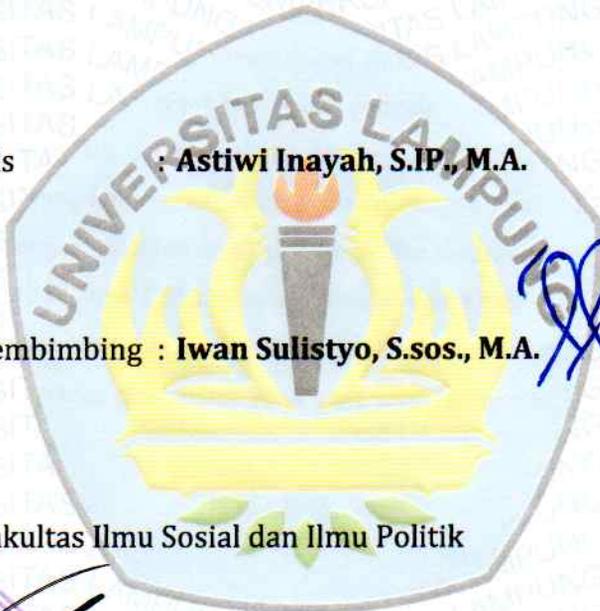
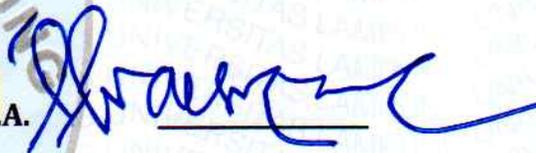
Ketua : **Dr. Ari Darmastuti, M.A.**



Sekretaris : **Astiwi Inayah, S.IP., M.A.**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Iwan Sulisty, S.sos., M.A.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP.19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **10 Agustus 2022**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro Nomor 1 Bandar Lampung, 35145
Telepon / Fax. (0721)704626 Laman: <http://hi.fisip.unila.ac.id>



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 2 Agustus 2022
Yang membuat pernyataan,



Satriana Rahma D
NPM. 1716071078

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kotabumi, Lampung Utara pada 26 Mei 1999 dari pasangan Bapak Gunawan Rasyid dan Ibu Heviza. Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN 1 Way Mengaku, Lampung Barat. Penulis melanjutkan sekolah menengah pertama di Kota Bandar Lampung tepatnya di SMP Al-Kautsar, dan selanjut menempuh SMA di SMAN 2 Bandar Lampung. Penulis lulus SMA tahun 2017 dan diterima di Universitas Lampung jurusan Hubungan Internasional dan menamatkan perguruan tinggi pada tahun 2022.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Saat ini penulis tengah disibukan dengan kesibukan sebagai *Social Media Specialist* di PT. Rumah Masker Indonesia.

Motto

“wonder if I get quicker if I was an accountant”

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur

Penulis mempersembahkan karya ini untuk

“Keluargaku”

“Khususnya untuk Ayah dan Ibun, sebagai tanda bakti dan bentuk terima kasihku atas doa, kasih sayang, dukungan, dan nasihat yang tulus dan tidak terhingga”

Kedua kakakku yang selalu memberikanku dukungan dan saran

Diriku sendiri atas semangat dan kesediaan untuk selalu berproses

SANWACANA

Puji syukur penulisaturkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi dengan judul “*Perbandingan Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan Terkait Comfort Women*” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Pada kesempatan ini penulis akan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
3. Bapak Dr. Aril Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
4. Bapak Roby Cahyadi, S.IP., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
5. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung dan sebagai Dosen Pembimbing Utama yang dengan sabar meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi
6. Bapak Hasbi Sidik, S.IP., M.A, selaku Sekretaris Jurusan Hubungan Interasional Universitas Lampung, yang telah banyak membantu penulis dalam seluruh kegiatan administrasi akademik

7. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si., sebagai pembimbing akademik yang telah banyak memberikan arahan terkait perkuliahan dan membimbing penulis dalam menemukan topik penelitian
8. Ibu Astiwi Inayah, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang bersedia meluangkan waktunya dan selalu sabar dalam membimbing penulis selama proses penyelesaian skripsi ini
9. Bapak Iwan Sulisty, S.Sos., M.A., selaku Dosen Pembahas yang bersedia memberikan saran dan masukan kepada penulis
10. Segenap dosen jurusan Hubungan Internasional, Universitas Lampung. Terima kasih atas ilmu yang bapak dan ibu berikan, semoga kelak ilmu yang penulis peroleh dapat menjadi bekal berharga untuk kedepannya
11. Prof (Emeritus) Yang Seung-yoon yang bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber penulis
12. Ayah dan Ibum yang selalu mendoakan dan memberikan nasihat untukku. 5 tahun terakhir keluarga kita telah banyak melalui pasang surut, tetapi ayah dan ibun tidak henti-hentinya memberikanku dukungan materi dan non-materi dengan tulus. Menungguku lulus kuliah sampai 11 semester pasti tidak mudah untuk ayah dan ibun, tetapi baik ayah maupun ibun tidak pernah mengeluh bahkan senantiasa mencurahkan perhatian dan kasih sayang untukku agar aku tetap semangat menyelesaikan pendidikanku
13. Kedua kakakku tersayang, Sella Khoirunnisa dan Soraya Dilasya yang senantiasa memberikan semangat, saran, dan motivasi.
14. Kakakku Deni dan keponakanku tersayang, Ameera
15. Keluarga besarku yang tidak pernah bertanya “kapan lulus?”, selalu memberikan motivasi, dan menjadi teman diskusi
16. Kennia dan Zahra, terima kasih telah menjadi sahabat baikku selama 10 tahun terakhir. Kepedulian, kasih sayang, dan kekonyolan kalian akan aku ingat selalu. Senang rasaya dapat tumbuh dewasa bersama.
17. *Support system* tersayang Nia, Ami, Lovannie. Terima kasih telah banyak telah membantuku selama menjalani masa perkuliahan, kalian secara tulus selalu mendukungku, menjadi teman diskusi yang baik, dan saling menguatkan satu sama lain

18. Teman-teman seperjuanganku Kak Nabila, Dola, dan Era yang bersedia menjadi temanku selama menjalani masa perkuliahan, terima kasih atas kebaikan kalian.
19. Teman – teman HI 17 yang namanya tidak dapat aku sebutkan satu persatu, semangat untuk kita semua
20. *Sisters* tersayang Husna, Hana, Eci, Bowo, Nada, Hilery, Resta, Tara, dan Sandra. Kita bersepuluh melalui proses pendewasaan yang tidak mudah dan masing-masing dari kita memiliki kesulitan tersendiri, terima kasih untuk selalu kuat dan berproses.
21. Segenap team PT. Rumah Masker Indonesia, terima kasih atas pengalaman yang telah diberikan
22. Teman-teman IIS 1 2017 SMAN 2 Bandar Lampung terkhusus untuk Vre, Anya, Inan, dan Shaqilla

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna namun penulis berharap semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-------------|
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR GAMBAR..... | vii |
| DAFTAR SINGKATAN..... | viii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Penelitian Terdahulu | 5 |
| 1.3 Rumusan Masalah | 9 |
| 1.4 Tujuan Penelitian | 9 |
| 1.5 Manfaat Penelitian | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 11 |
| 2.1 Landasan Konseptual | 11 |
| 2.1.1 Kebijakan Luar Negeri..... | 11 |
| 2.1.2 Perbandingan Politik | 13 |
| 2.2 Kerangka Pikir | 15 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 17 |
| 3.1 Jenis Penelitian..... | 17 |
| 3.2 Fokus Penelitian | 18 |
| 3.3 Jenis dan Sumber Data | 18 |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data..... | 19 |
| 3.5 Teknik Analisis Data..... | 19 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 21 |
| 4.1 Hasil | 21 |
| 4.1.1 Comfort Women..... | 21 |

| | |
|--|-----------|
| 4.1.2 Hubungan Bilateral Korea Selatan dan Jepang Terkait Isu Comfort Women | 25 |
| 4.2 Pembahasan | 28 |
| 4.2.1 Kebijakan Park Geun-hye..... | 28 |
| 4.2.2 Kebijakan Moon Jae-in..... | 31 |
| 4.2.3 Perbandingan Kebijakan Park Geun-hye dan Moon Jae-in | 34 |
| 4.2.3.1 Pendekatan Kebijakan Luar Negeri yang Digunakan | 35 |
| 4.2.3.2 Hasil dari Kebijakan Luar Negeri pada Lingkup Domestik | 40 |
| 4.2.3.3 Faktor Pendukung Kebijakan pada Level Domestik | 44 |
| 4.2.3.4 Faktor Pendukung Kebijakan pada Level Internasional | 49 |
| BAB V PENUTUP..... | 57 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 57 |
| 5.2 Saran..... | 59 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|--|---------|
| 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu..... | 7 |
| 2. Diskusi Tertutup Antara Korea Selatan dan Jepang..... | 37 |
| 3. Ringkasan Perbandingan Kebijakan..... | 54 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|-----------------------------------|---------|
| 1. Model Kerangka Penelitian..... | 16 |
| 2. Patung Comfort Women..... | 27 |

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|--------|---|
| GSOMIA | : <i>General Security of Military Information Agreement</i> |
| ROK | : <i>Republic of Korea</i> |
| BOK | : <i>Bank of Korea</i> |
| KTT | : <i>Konverensi Tingkat Tinggi</i> |
| PM | : <i>Perdana Menteri</i> |
| ASEAN | : <i>Association of Southeast Asia Nations</i> |
| UU | : <i>Undang-Undang</i> |
| UNHCR | : <i>United Nations High Commissioner for Refugees</i> |
| LSM | : <i>Lembaga Swadaya Masyarakat</i> |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korea Selatan dan Jepang diketahui memiliki sejarah diplomatik yang cukup kelam sehingga faktor historis berupa penjajahan Korea Selatan oleh Jepang cukup berpengaruh pada hubungan kedua negara. Sejarah kolonialisme Jepang memang kerap menjadi penghambatan hubungan diplomatik Tokyo dan Seoul. Pada tahun 1907, semenanjung Korea masih dianggap sebagai negara yang ilegal secara hukum internasional dan belum diakui, Jepang yang memang sudah sejak 1876 mengikuti pola internasional yaitu membuka paksa negara untuk berdagang secara legal menganeksasi wilayah Korea pada tahun 1910 melalui perjanjian(Dudden, 2015, hal. 61).

Selama tahun 1910 – 1945 Jepang menjajah Korea Selatan menyisakan berbagai masalah, salah satu warisan masalah adalah *comfort women* atau kerap disebut dengan *jugun ianfu*(従軍慰安婦)¹. Jepang mendirikan sebuah ‘*comfort stations*’ atau rumah bordil di seluruh wilayah di Asia dan Kepulauan Pasifik yang diduduki, *comfort stations* didirikan untuk menyediakan fasilitas bagi wanita atau anak perempuan yang disebut ‘*comfort women*’ dalam melakukan perbudakan seksual untuk militer Jepang(Ahn, 2019, hal. 361). Para *comfort women* berasal dari berbagai macam negara, yang kecenderungannya adalah para wanita ini direkrut dari daerah jajahan Jepang atau wilayah yang sudah mereka kuasai.

Perbudakan seksual ini berlangsung cukup lama dimulai sejak Jepang mendirikan *comfort station* pertama di Shanghai pada tahun 1932 dan berakhir pada tahun 1945. Menurut Hirofumi Hiyashi (2007), wanita penghibur ini terdiri

¹*Comfort Women* adalah eufemisme atau istilah halus untuk budak seks selama Perang Dunia II oleh para tentara Jepang

dari wanita Jepang, Korea, Tiongkok, Malaya (Malaysia dan Singapura), Thailand, Filipina, Indonesia, Vietnam, Myanmar, bahkan beberapa wanita Eropa seperti Belanda, dengan perkiraan jumlah berkisar 20.000 hingga 30.000. Dari banyaknya wanita yang direkrut oleh militer Jepang, antara 70 hingga 80 persen '*comfort women*' adalah orang Korea (Ruiz, 2020). Isu *comfort women* yang pada awalnya merupakan isu minor kini berkembang menjadi isu nasional dan sengketa dalam hubungan diplomatik antara Jepang dan Korea Selatan.

Hingga tahun kedua masa kepemimpinan Presiden Moon Jae-in ditahun 2019 sulit untuk melakukan upaya rekonsiliasi mengingat adanya perbedaan pendapat antara Jepang dan Korea Selatan. Setidaknya Jepang memiliki 4 alasan untuk menyediakan wanita penghibur. Pertama, Jepang ingin memperbaiki citranya setelah peristiwa '*Rape of Nanking*' dengan membatasi tindak pelecehan atau pemerkosaan di wilayah yang diduduki. Kedua, untuk mencegah sentimen anti-Jepang yang dapat mengobarkan semangat penduduk lokal daerah pendudukan. Ketiga, untuk menjaga kesehatan para tentara Jepang yang kerap melakukan pemerkosaan dalam skala besar yang membuat mereka terjangkit penyakit kelamin, meskipun Jepang menyebut para *comfort women* rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Keempat, untuk mencegah para personel militer untuk mengunjungi rumah bordil setempat yang dianggap Jepang berpotensi memiliki mata-mata yang berbahaya (Arkibay, 2003, hal. 377).

Disisi lain Korea Selatan menyatakan bahwa pada kenyataannya para *comfort women* kerap menerima perilaku kekerasan seksual, perbudakan, kekerasan fisik, hingga pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius dari para tentara Jepang. Seorang wanita dilaporkan ditahan di sebuah rumah dengan tiga puluh wanita lainnya dan diperkosa dua puluh hingga tiga puluh kali hampir setiap malam selama tujuh tahun (Tongshutsi, 1994, hal. 415). Permasalahan HAM serius yang telah lama teredam ini pertama kali terangkat ke publik pada tahun 1991. Kim Hak Sun adalah orang pertama yang memberikan kesaksian saat konferensi pers pada tahun 1991, ia membuka jalan bagi korban lainnya untuk bersuara (Luck, 2018, hal. 19).

Jepang menanggapi masalah '*comfort women*' dengan tidak konsisten melalui serangkaian responnya. Di tahun 1991 pasca Kim Hak-sun memberikan

testimoninya, pemerintah Jepang secara tegas membantah keterlibatan negara dan militer dalam sistem *comfort women* dan menolak untuk memberikan ganti rugi berupa kompensasi maupun pernyataan maaf. Jepang berdalih bahwa *1951 San Fransisco Peace Treaty* dan berbagai kesepakatan bilateral telah menyelesaikan klaim kompensasi pasca perang, salah satunya *1965 Japan-ROK Normalization Treaty*, meskipun pada kenyataannya perjanjian tersebut tidak menyinggung mengenai permasalahan *comfort women* secara spesifik (Putri, 2018, hal. 74).

Jepang pada masa pemerintahan Perdana Menteri Kiichi Miyazawa mengakui keberadaan *comfort women system* dan memberikan pernyataan maaf untuk pertama kali pada 13 Januari 1992 mengakui keterlibatan militer Jepang dan meminta maaf namun menolak bertanggung jawab dan menyatakan bahwa sistem *comfort women* tidak melibatkan perilaku koersif (Putri, 2018, hal. 15). Pada tahun 1993 Jepang mendirikan *Asian Women Fund* sebagai upaya penyelesaian dan menawarkan permintaan maaf, kompensasi moneter, dukungan kesehatan, dan dukungan kesejahteraan kepada para korban yang masih hidup, namun dana tersebut didukung oleh sumbangan dari warga negara, serta merupakan proyek bersama pemerintah. *Asian Women Fund* dianggap hanya memikul tanggung jawab moral, tetapi bukan tanggung jawab hukum yang ditentang oleh banyak aktivis Korea (Haruki, 2008, hal. 1).

Meskipun tidak banyak dari korban *comfort women* yang hidup hingga saat ini, pemerintah Korea Selatan tetap berusaha untuk mencapai keadilan bagi warganya. Presiden Park Geun Hye yang memerintah Korea Selatan dari tahun 2013 hingga 2017, merupakan Presiden Korea Selatan yang pertama kali berdialog dengan Jepang sebagai upaya untuk mencapai kesepakatan final terkait isu *comfort women*. Penyelesaian permasalahan *comfort women* dilakukan dengan menandatangani perjanjian *Japan – South Korea Comfort Women Agreement* yang menyebut bahwa Jepang akan memberikan kompensasi kepada korban dan keluarganya, dan Jepang meminta Korea untuk membongkar patung peringatan *comfort women* yang berada di depan kantor kedutaan besar Jepang di Seoul sehingga permasalahan ini dianggap telah mencapai titik kesepakatan.

Namun setahun setelah menandatangani kesepakatan ini, Presiden Park secara resmi dimakzulkan pada tahun 2017, akibat dugaan penyalahgunaan

kekuasaan.²Pemecatan Presiden Park ini tentu saja berdampak terhadap hubungan diplomatik Korea Selatan dan Jepang yang sempat membaik. Berbagai kebijakan yang berlaku pada masa pemerintahan rezim Presiden Park turut dikritik oleh pihak oposisi, salah satunya adalah *2015 Japan – South Korea Comfort Women Agreement*. *Comfort Women* kembali menjadi isu pada debat calon Presiden Korea Selatan tahun 2017, mayoritas calon merasa perlu untuk menegosiasikan ulang kesepakatan pada tahun 2015 tersebut untuk menerima permintaan maaf yang lebih tulus dari Jepang(Rossi, 2017).

Pada masa pergantian pemimpin Korea Selatan, hubungan diplomatik Korea dan Jepang mengalami perubahan yang signifikan. Presiden Moon Jae In yang memerintah sejak tahun 2017 hingga 2022 memiliki kebijakan yang berbeda dan memiliki kecenderungan lebih keras. Korea Selatan dibawah pemerintahan Presiden Moon mengirim pemberitahuan resmi ke Jepang tentang pembubaran *The Reconciliation and Healing Foundation* yang merupakan hasil dari perjanjian tahun 2015 antara Presiden Park dan pemerintah Jepang(Kang, 2018). Presiden Moon secara terbuka menyinggung isu *comfort women* sebagai bentuk kejahatan perang dan pelanggaran HAM dan menyesali respon Jepang yang tidak menyesal secara tulus.Namun meskipun begitu, Jepang beranggapan bahwa isu *comfort women* secara legal telah selesai melalui perjanjian *2015 Japan – South Korea Comfort Women Agreement*dibawah administrasi Presiden Park.

Presiden Park maupun Presiden Moon sama-sama menuntut keadilan bagi para korban *comfort women*, pada awalnya Presiden Park menentang tindakan Jepang di masa lalu walau pada tahun-tahun akhir jabatannya ia bersedia untuk berdialog dengan Jepang. Adanya perbedaan dalam menanggapi sebuah sengketa diplomatik yang menentukan hubungan diplomatik Korea Selatan dan Jepang, membuat penulis tertarik untuk membandingkan kebijakan dua pemimpin Korea Selatan tersebut.

²Tepatnya pada 9 Desember 2016, Majelis Nasional memutuskan untuk mendakwa President Park, dengan 234 dari 300 suara, yang memindahkan kasus tersebut ke Mahkamah Konstitusi untuk ditinjau, sebagai langkah terakhir dari proses tersebut.

1.2 Penelitian Terdahulu

Isu mengenai *comfort women* mulai muncul sebagai perdebatan pada akhir Perang Dingin (Kumagai, 2016, hal. 67). Penulis memperkirakan bahwa kemunculan studi mengenai *comfort women* mulai banyak diteliti pada tahun-tahun pasca berakhirnya Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Penelitian pertama memaparkan bagaimana isu *comfort women* yang pada awalnya diangkat oleh sekelompok aktivis dan diabaikan oleh pemerintah Korea Selatan dikarenakan kekurangan dokumentasi dan bukti menjadi isu yang menarik perhatian dari komunitas internasional (Jonsson G., 2015). Terdapat dinamika hubungan dan respon Jepang dan Korea Selatan terkait *comfort women*. Berbagai upaya rekonsiliasi yang berusaha dicapai terus menemui jalan buntu. Contoh kegagalan upaya rekonsiliasi antara Korea Selatan dan Jepang terjadi pada *Asian Women's Fund* yang didirikan pemerintah Jepang. Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa tidak adanya pencapaian dari berbagai upaya rekonsiliasi yang dilakukan pemerintah kedua negara sebelumnya dikarenakan Jepang tidak menawarkan permintaan maaf resmi dan memberikan kompensasi atau memenuhi tuntutan atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukannya terhadap *paracomfort women*, sehingga masalah ini akan sulit untuk diselesaikan.

Penelitian kedua bertujuan untuk menjelaskan bahwa Amerika Serikat mengambil peran besar dalam tercapainya kesepakatan antara Jepang dan Korea Selatan. Hal ini berkaitan dengan kepentingan keamanan Amerika Serikat, Amerika Serikat menyebut Jepang dan Korea Selatan sebagai aliansi penting di kawasan Asia Pasifik dalam menghadapi krisis nuklir Korea Utara dan perkembangan Cina, sehingga Amerika Serikat berharap agar kedua sekutunya dapat bekerja sama dengan baik (Kumagai, 2016). Sehingga salah satu hal yang mungkin melatarbelakangi keputusan Korea Selatan yang setuju untuk berdiskusi dengan Jepang terkait isu *comfort women* adalah bahwa isu *comfort women* tidak diprioritaskan dalam diplomasi Korea Selatan pada saat itu dibawah administrasi Park. Pada akhirnya, hubungan Korea Selatan dan Jepang sangat dipengaruhi baik oleh keamanan dan hubungan ekonomi maupun oleh masalah sejarah. Namun,

terkadang masalah keamanan dan ekonomi menutupi masalah sejarah dan di lain waktu, masalah sejarah juga turut ditekankan.

Ketiga merupakan penelitian yang menjelaskan mengapa hubungan Korea Selatan dan Jepang masih buruk walaupun sudah mencoba untuk melakukan rekonsiliasi melalui perjanjian pada tahun 1965 dan 2015 (Le, 2019). Serangkaian upaya rekonsiliasi yang terjalin antara Jepang dan Korea Selatan tidak tegas, pemerintah Jepang sering merilis pernyataan maaf tanpa melibatkan pemerintah Korea Selatan dan korban pada masa kolonialnya sehingga menyebabkan masalah legitimasi dan krisis kepercayaan dari masyarakat Korea Selatan yang berujung pada sulitnya mencapai kesepakatan. Penelitian berargumen bahwa tanpa persetujuan dan rekonsiliasi yang tegas maka hubungan diplomatik yang terjalin hanya akan bergantung kepada kepribadian dan agenda pemimpin yang berkuasa. Saran melalui penelitian ini adalah Jepang harus menghindari penyangkalan masa lalunya dan fokus pada pemulihan citra pascaperang, sementara para korbannya harus menghindari kebutuhan untuk terus menerus memermalukan Jepang. Salah satu alasan mengapa perjanjian sebelumnya ini tidak memiliki dampak yang bertahan lama adalah karena banyak orang Korea tidak percaya bahwa permintaan maaf orang Jepang itu tulus.

Penelitian keempat merupakan jurnal yang menjelaskan bahwa permasalahan *comfort women* yang terjadi pada tahun 1932 terus memberikan dampak kepada hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Jepang (Gracelia, 2019). Pertama yaitu, perang dagang Jepang – Korea Selatan 2019. yang pada awalnya merupakan respon Jepang terhadap tindakan Mahkamah Agung Korea Selatan yang memerintahkan tiga perusahaan Jepang untuk memberikan kompensasi kepada korban kerja paksa pada Perang Dunia II. Kedua, penarikan Korea Selatan dari *General Security of Military Information Agreement* (GSOMIA) yang merupakan kerja sama trilateral antara Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat untuk bertukar informasi keamanan.

Tabel 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

| Indikator | Penelitian 1 | Penelitian 2 | Penelitian 3 | Penelitian 4 |
|----------------------------|---|--|---|---|
| Judul | <i>Can Japan – Korea Dispute on “Comfort Women” be Resolved?</i> | <i>The Background to the Japan – Republic of Korea Agreements: Compromises Concerning the Understanding of Comfort Women Issue</i> | <i>Negotiating in Good Faith: Overcoming Legitimacy Problems in Japan – South Korea Reconciliation Process</i> | Implikasi Penanganan Masalah <i>Comfort Women</i> Terhadap Hubungan Jepang dan Korea Selatan Pada Tahun 2015 – 2019 |
| Penulis | Gabriel Jonsson | Naoko Kumagai | Tom Phuong Lee | Jeniffer Gracelia |
| Jenis Penelitian | Kualitatif Deskriptif | Kualitatif | Kualitatif Deskriptif | Kualitatif |
| Landasan Teori atau Konsep | Teori Diplomasi | Konsep Perjanjian Internasional | Teori Diplomasi | Konstruktivisme |
| Fokus Penelitian | Berfokus pada upaya yang dilakukan kedua negara untuk mencapai kesepakatan dalam isu “comfort women”, serta pandangan kedua negara terhadap isu tersebut melalui analisis terhadap museum di kedua negara | Berfokus pada faktor yang melatarbelakangi kesepakatan antara Jepang dan Korea dalam isu ‘comfort women’ tahun 2015 | Berfokus mengenai upaya rekonsiliasi antara Jepang dan Korea Selatan yang selalu gagal meskipun telah menandatangani perjanjian ditahun 1965 dan 2015 | Berfokus dalam melihat dampak yang disebabkan oleh masalah <i>comfort women</i> terhadap hubungan bilateral Jepang dan Korea. |
| Kesimpulan | Upaya rekonsiliasi terus | Tercapainya <i>Japan – South Korea</i> | Kegagalan dalam mencapai | Isu <i>comfort women</i> telah berdampak luas |

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| | berusaha untuk dilakukan oleh dua belah pihak namun upaya – upaya tersebut selalu mengalami kegagalan dikarenakan Jepang yang gagal memenuhi tuntutan Korea Selatan untuk mengakui kesalahan secara terbuka, meminta maaf secara tulus, dan memberikan kompensasi. | <i>Agreement on Comfort Women</i> tahun 2015 dipengaruhi oleh aliansi penting mereka yaitu Amerika Serikat yang mengambil peran sebagai mediator, serta dipengaruhi juga oleh adanya pergeseran persepsi dari kedua negara mengenai sejarah | kesepakatan tersebut tersebut diakibatkan oleh proses rekonsiliasi yang cacat, tidak tegas, dan perjanjian yang tidak mampu mengikat kedua belah pihak sehingga hubungan diplomatik hanya bergantung pada agenda pemimpin yang tengah berkuasa | baik terhadap sektor keamanan, ekonomi, maupun sosial. Seperti keluarnya Korea Selatan dari GSOMIA, perang dagang, serta meningkatnya sentimen anti Jepang di Korea Selatan |
|--|--|---|--|---|

Penelitian-penelitian diatas merupakan penelitian yang penulis anggap relevan dengan penelitian yang akan dikaji. Perbedaan penelitian pertama terletak pada fokus penelitian, penelitian Jonsson lebih berfokus pada dinamika hubungan kedua negara serta upaya penyelesaian konflik. Perbedaan pada penelitian kedua terletak pada fokus penelitian, penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang melatarbelakangi perjanjian. Namun terdapat perbedaan fokus penelitian yaitu penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang menghambat kesuksesan perjanjian antar Jepang dan Korea bukan pada kebijakan luar negerinya. Perbedaan penelitian terakhir terletak pada fokus penelitian yang ditujukan kepada implikasi saja. Melalui penjabaran diatas diketahui bahwa 4 penelitian memiliki keterikatan topik yang akan dibahas oleh penelitian ini. Secara keseluruhan

perbedaan 4 penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terdapat pada fokus penelitian, penelitian ini berfokus pada perbandingan kebijakan luar negeri Korea Selatan secara periodik antara dua orang presiden terkait isu *comfort women*.

1.3 Rumusan Masalah

Warisan masalah kolonial yaitu *comfort women* telah lama menjadi isu sengketa antara Jepang dan Korea Selatan. Jepang sebagai pihak bersalah yang dituduhkan Korea Selatan tidak kunjung menanggapi tuntutan-tuntunan yang dilayangkan oleh korban, masyarakat, dan berbagai LSM di Korea Selatan secara tepat dan tidak menganggap serius kejahatan mereka di masa lalu.

Pemerintah Korea Selatan baik di masa Park Geun-hye maupun era kepemimpinan Moon Jae-in sama-sama mementingkan kepentingan nasional, dengan menuntut kebijakan reparatif Jepang dan pernyataan maaf secara tulus. Meskipun begitu seperti yang sudah dipaparkan diatas, pemerintah Korea Selatan dibawah administrasi Presiden Park dan Presiden Moon menempuh cara berbeda untuk mencapai kesepakatan dengan pihak Jepang.

Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan kebijakan luar negeri Korea Selatan pada era Presiden Park Geun-hye dan era Presiden Moon Jae-in terkait isu *Comfort Women*?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai isu *comfort women*serta respon dan dinamika Korea Selatan dan Jepang atas isu tersebut.
2. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Jepang pada era Presiden Park Geun-hye dan era Presiden Moon Jae-in terkait isu *Comfort Women*.

1.3 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat teoritis maupun manfaat praktis dalam kajian keilmuan Hubungan Internasional dan masyarakat.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan kajian mengenai perbandingan politik, utamanya perbandingan politik kebijakan luar negeri Korea Selatan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pada penelitian berikutnya yang berkaitan mengenai isu '*comfort women*'.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan mampu menambah wawasan mengenai isu-isu '*comfort women*' sebagai bentuk kejahatan perang Jepang serta menambah pengetahuan mengenai perbandingan politik dan kebijakan yang berbeda dalam mencapai kesepakatan pada era Presiden Park Geun-hye dan era Presiden Moon Jae-in.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Konseptual

2.1.1 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan tujuan, strategi, tindakan, metode, pedoman, arahan, pemahaman, kesepakatan, dan sebagainya, yang dilakukan pemerintah suatu negara dalam melakukan hubungan internasional satu sama lain dan dengan organisasi internasional dan aktor non-pemerintah (Jackson & Sorensen, 2013, hal. 252). Kebijakan luar negeri terdiri dari tujuan dan tindakan yang dimaksudkan untuk memandu keputusan dan langkah-langkah pemerintah dalam hal urusan luar negeri, khususnya hubungan dengan negara asing. Bagi Breuning kebijakan luar negeri dapat didefinisikan sebagai totalitas kebijakan suatu negara dan interaksi dengan lingkungan di luar negaranya (Breuning, 2007, hal. 5).

Merumuskan suatu kebijakan luar negeri dilakukan melalui serangkaian proses dalam pengambilan kebijakan. Pejabat pemerintahan seperti presiden, perdana menteri, menteri luar negeri, menteri pertahanan, menteri keuangan, dan sebagainya biasanya menjadi pembuat kebijakan utama (Jackson & Sorensen, 2013, hal. 252). Para pembuat kebijakan akan melakukan pertimbangan dengan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor.

Melalui tulisan Marijke Breuning, selain mempertimbangkan kondisi dalam negeri dan isu internasional yang tengah dihadapi, ia memiliki pandangan bahwa pemimpin memiliki pengaruh yang signifikan dalam suatu pengambilan

keputusan. Breuning berbagi contoh mengenai pengaruh kepemimpinan pada kasus Iran saat Perang Teluk, Inggris pada awal Perang Dunia II, dan Rusia pada krisis misil Kuba, yang dipandang sebagai suatu kebijakan yang kurang tepat atau irrasional.

Terdapat variabel-variabel penting dalam menganalisis kebijakan luar negeri yang disederhanakan oleh Valerie Hudson menjadi 2 bagian. Pertama eksplanandum yang berarti hal yang akan dijelaskan dalam analisis kebijakan luar negeri atau akan menjadi keputusan yang diambil oleh pembuat keputusan dengan mengacu atau memiliki konsekuensi terhadap entitas diluar negaranya(Hudson, 2013, hal. 4). Kedua, eksplanan merupakan bagian yang akan memberikan penjelasan dari eksplanandum, atau faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan luar negeri.(Hudson, 2013, hal. 6).

Two Level Games dari Robert D. Putman mencoba menjawab pertanyaan tentang apakah politik domestik dapat memengaruhi politik internasional maupun sebaliknya, teori ini memandang bahwa politik domestik dan politik internasional seringkali berkaitan. Putnam memandang *two level games* sebagai metafora untuk interaksi domestik dan internasional(Putnam, 1998, hal. 433).

- Pada level nasional, kelompok domestik mengejar kepentingan mereka dengan menekan pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang menguntungkan, dan politisi mencari kekuasaan dengan membangun koalisi di antara kelompok tersebut.
- Pada level internasional, pemerintah nasional berusaha memaksimalkan kemampuannya sendiri untuk memuaskan tekanan dalam negeri, sambil meminimalkan konsekuensi buruk dari perkembangan luar negeri.

Seiring dengan berkembangnya studi mengenai kebijakan luar negeri dan pemahaman yang lebih mendalam terkait analisisnya, maka terdapat pergeseran mengenai peran negara, yaitu negara tidak lagi menjadi aktor tunggal namun muncul juga aktor-aktor baru seperti aktor non state, hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya isu-isu kontemporer yang muncul. Teori kebijakan luar negeri

dipergunakan dalam penelitian ini sebagai suatu pisau untuk menganalisis atau melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan pandangan pemerintah terhadap isu *comfort women*. Kemudian dengan mengadopsi konsep *two level games* Robert D. Putman untuk melihat faktor-faktor domestik maupun internasional yang memengaruhi pengambilan kebijakan.

2.1.2 Perbandingan Politik

Perbandingan politik adalah subbidang dalam disiplin akademis ilmu politik serta metode atau pendekatan untuk studi politik (Kesselman, Krieger, & Joseph, 2009, hal. 10). Subjek penelitian perbandingan politik dapat berupa politik suatu negara atau masyarakat. Perbandingan politik berusaha untuk mengukur atau menjelaskan persamaan dan perbedaan di antara negara atau negara bagian (Kesselman, Krieger, & Joseph, 2009, hal. 13). Sementara perbandingan politik pada dasarnya adalah tentang menggunakan perbandingan di berbagai unit analisis untuk menggambarkan mekanisme sebab akibat yang menjelaskan variasi antara hasil politik, sosial, dan ekonomi dalam unit-unit tersebut dan di luarnya (Culpepper, 2005, hal. 1).

Terdapat beberapa strategi dalam melakukan perbandingan politik, yang terbagi atas 3 metode yaitu *many countries* untuk membandingkan banyak negara atau lebih dari 50 negara, *few countries* untuk membandingkan kurang dari 20 negara, dan *single country* untuk membandingkan 1 negara saja. Metode *many countries* adalah metode terbaik untuk menarik kesimpulan yang memiliki penerapan lebih global, metode *few countries* dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih baik diinformasikan oleh kota-kota spesifik kontekstual negara-negara yang diteliti, *single country* dapat memberikan deskripsi kontekstual, menghasilkan hipotesis, teori konfirmasi dan perusahaan, dan memperkaya pemahaman kita tentang negara-negara menyimpang yang diidentifikasi (Landman, 2008, hal. 29).

Metode perbandingan politik *single country* dirasa tepat dalam membantu penulis untuk menganalisis kebijakan Park Geun-hye dan kebijakan Moon Jae-in

terkait isu *comfort women*, dikarenakan metode *single country* dapat digunakan untuk membandingkan suatu negara secara periodik. Metode *single country* digunakan untuk menganalisis suatu negara yang dilihat dari dinamika perkembangan politik, perbedaan periode sejarah, maupun fenomena dalam suatu negara. Metode *single country* berguna untuk memeriksa berbagai macam masalah komparatif (Landman, 2008, hal. 28).

Dalam memahami suatu kebijakan luar negeri maka diperlukan suatu analisis perbandingan politik luar negeri. Perbandingan politik luar negeri adalah subbidang hubungan internasional yang mengkaji proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri yang terkait dengan peristiwa penting serta pola dalam interaksi sehari-hari dari hampir 200 negara yang berbeda (Lantis & Beasley, 2017, hal. 1). Analisis perbandingan politik luar negeri dimulai dengan teori yang mengidentifikasi berbagai faktor, aktor, dan kondisi yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri negara (Lantis & Beasley, 2017, hal. 4).

Terdapat beberapa level analisis untuk mengkategorikan faktor-faktor tersebut (Lantis & Beasley, 2017, hal. 4). Pertama, dinamika sistem internasional atau faktor eksternal dapat membantu menjelaskan bagaimana sistem internasional diatur, karakteristik hubungan internasional kontemporer, dan tindakan negara lain, yang akan berefek pada kebijakan luar negeri yang dirumuskan oleh suatu negara. Kategori kedua menunjuk pada faktor internal seperti karakteristik sistem politik dalam negeri yang dapat membentuk kebijakan luar negeri suatu negara. Kategori ketiga mengeksplorasi pengaruh pemimpin individu dan menawarkan perspektif yang berfokus pada agen dalam pembuatan kebijakan luar negeri atau karakteristik dari pemimpin.

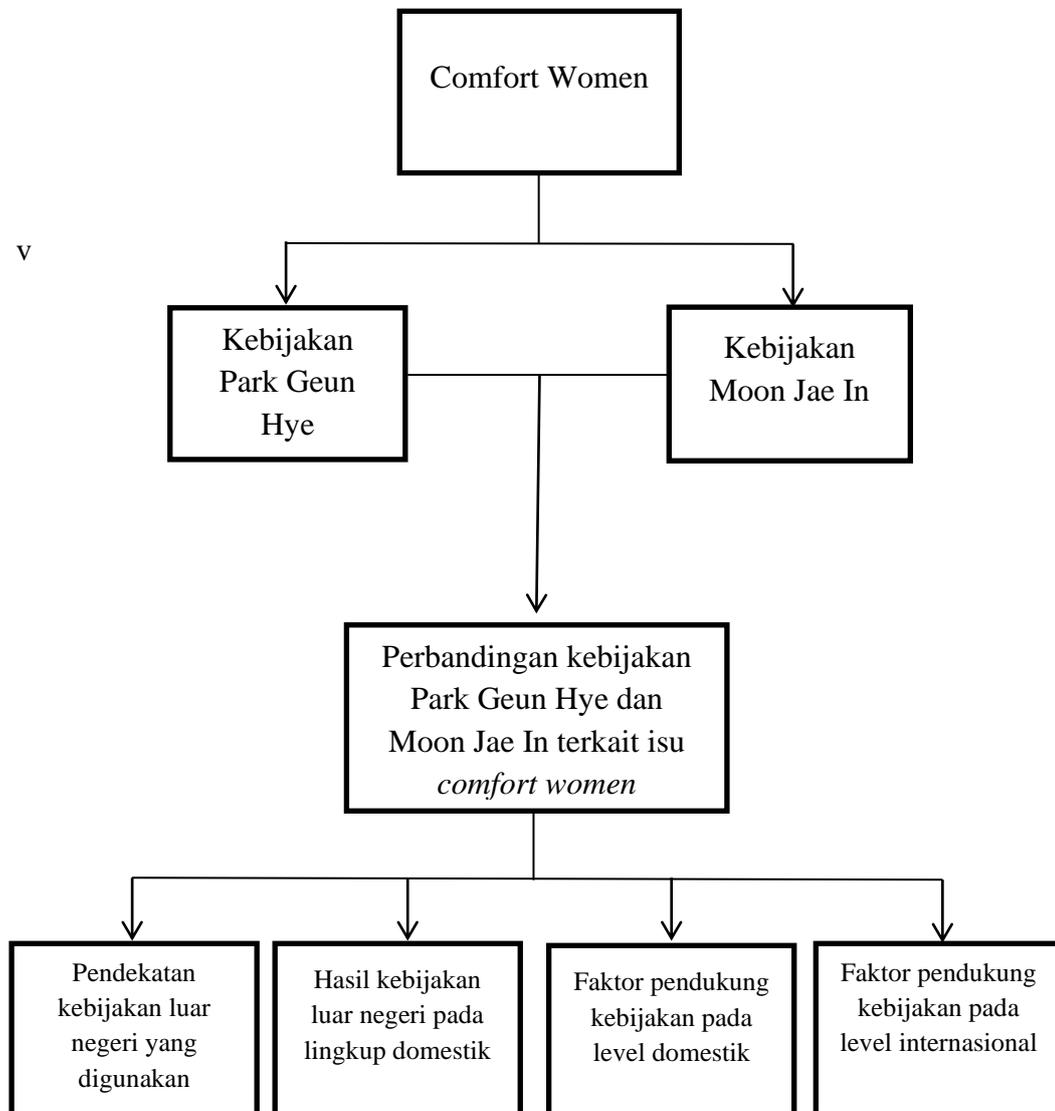
Perbandingan politik diaplikasikan pada penelitian dengan menggunakan metode *single country* untuk membandingkan kebijakan Korea Selatan terhadap isu *comfort women* secara periodik pada masa Presiden Park dan Presiden Moon. Peneliti juga menggunakan analisis perbandingan politik, dalam melihat berbagai faktor yang memengaruhi kebijakan.

2.2 Kerangka Pikir

Isu *comfort women* telah lama menjadi sengketa diplomatik antara Jepang dan Korea Selatan, bahkan menjadi salah satu faktor penghambat hubungan bilateral keduanya. Seiring dengan pergantian pemimpin Korea Selatan, telah dilakukan berbagai upaya untuk mencapai kesepakatan dan menekan Jepang untuk memenuhi tuntutan guna mencapai keadilan bagi para korbannya. Pada tahun 2015 menandai hari bersejarah bagi Korea Selatan, dibawah kepemimpinan Presiden Park Geun-hye, Jepang dan Korea Selatan menandatangani perjanjian terkait isu *comfort women* yang disebut sebagai kesepakatan final dan tidak dapat diganggu gugat. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai Park Geun Hye yang pada awal masa jabatannya bereaksi keras dengan menolak segala bentuk dialog dengan Jepang.

Pergantian pemimpin menandakan awal baru bagi hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan, ketika Presiden Moon Jae-in membubarkan *Reconciliation and Healing Foundation*. *Reconciliation and Healing Foundation* merupakan hasil kesepakatan pada masa kepemimpinan Presiden Park. Melalui tindakannya, secara tidak langsung Presiden Moon menolak keabsahan perjanjian tahun 2015 terkait isu *comfort women* dan secara terbuka mengkritik masa lalu Jepang sehingga meningkatkan tensi diantara kedua negara. Namun, diketahui bahwa Presiden Moon belum berupaya untuk melakukan renegosiasi.

Perbedaan Presiden Park dan Presiden Moon dalam menanggapi isu *comfort women*, memunculkan adanya perbandingan diantara keduanya. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan bervariasi, karena hubungan bilateral dengan Jepang sangat bergantung dengan kepribadian dan agenda dari pemimpin yang tengah berkuasa (Le, 2019, hal. 5). Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada perbandingan 4 aspek dalam kebijakan luar negeri yang dirumuskan oleh kedua presiden, yaitu pendekatan kebijakan luar negeri yang digunakan, hasil dari kebijakan luar negeri pada lingkup domestik, faktor pendorong kebijakan pada level domestik, dan faktor pendorong kebijakan pada level internasional. Penulis membandingkan kebijakan dari Park Geun Hye dan Moon Jae In dengan metode *single country*, sehingga dibentuk sebuah kerangka pikir.



Gambar 1 Model Kerangka Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena dianggap relevan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas mengenai studi kasus kebijakan dua Presiden Korea Selatan terkait isu *comfort women*, dan membandingkan dua kebijakan tersebut. Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai sarana untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang terkait dengan masalah sosial atau manusia (Creswell, 2009, hal. 4).

Analisis data kualitatif juga dapat diartikan sebagai penggolongan dan penafsiran materi linguistik (atau visual) untuk membuat pernyataan tentang dimensi implisit dan eksplisit serta struktur pemaknaan dalam materi dan apa yang direpresentasikan didalamnya (Maxwell, Chmiel, 2013, hal. 5). Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif dimaksud untuk mengkaji fenomena-fenomena sosial, dengan meneliti subjek penelitian untuk menghasilkan data yang mendalam dan spesifik. Setidaknya terdapat 5 ciri pada penelitian kualitatif (Bogdan & Biklen, 2009, hal. 6). Pertama yaitu penelitian kualitatif bersifat naturalistik yaitu penelitian kualitatif memiliki setting aktual sebagai sumber data langsung dan peneliti adalah instrumen kuncinya, data dikumpulkan di tempat dan dilengkapi dengan pemahaman yang diperoleh dengan berada di lokasi. Kedua, penelitian kualitatif bersifat deskriptif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau gambar bukan angka, data tersebut meliputi transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, memo, dan catatan resmi lainnya. Ketiga, peneliti kualitatif cukup berpaku pada proses daripada hanya dengan hasil atau produk. Keempat, penelitian kualitatif menggunakan logika induktif karena bersifat teori *testing* yaitu berawal dari fakta-

fakta yang ada dilanjutkan dengan pengujian teori atau konsep, dan juga bersifat dari khusus ke umum. Kelima, peneliti kualitatif tertarik dengan ‘makna’ yang atau perspektif partisipan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif secara komparatif yang dimaksudkan untuk menganalisis adanya perbedaan pada kebijakan Presiden Park Geun-hye dan kebijakan Presiden Moon Jae-in terkait isu *comfort women*.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi mengenai masalah yang akan diteliti sehingga tidak memperluas kajian yang akibatnya tidak sesuai dengan pertanyaan penelitian. Penelitian ini berfokus pada kebijakan masa pemerintahan Presiden Park Geun-hye dan masa pemerintahan Presiden Moon Jae-in terkait isu *comfort women* yang telah lama menjadi sengketa diplomatik antara Korea Selatan dan Jepang. Penelitian ini akan membandingkan 4 aspek yaitu pendekatan kebijakan luar negeri yang digunakan, hasil kebijakan luar negeri pada lingkup domestik, dan tekanan yang mempengaruhi kebijakan pada level domestik dan internasional. Konsep *two level games* digunakan untuk melihat tekanan-tekanan dari level internasional dan domestik Korea Selatan sehingga mempengaruhi kebijakan, kemudian membandingkan kebijakan dari kedua presiden tersebut.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Terdapat dua jenis data untuk melengkapi penelitian, yaitu berupa data primer dan data sekunder namun pada penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Data sekunder dapat diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, dll), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda, dan lain-lain yang dapat memperkaya data, penggunaan data sekunder juga dapat membantu peneliti untuk memperoleh informasi yang tidak dapat tersedia di sumber data primer (Vartanian, 2010, hal. 3). Adapun dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder yang berbentuk

material tertulis. Penulis menghimpun data-data yang berkaitan dengan kebijakan Presiden Park Geun-hye dan Presiden Moon Jae-in terkait isu *comfort women* melalui sumber-sumber berupa buku, jurnal, laporan tertulis maupun dokumen terkait objek penelitian, artikel, berita internasional, serta jurnal, laporan, dan artikel berita berbahasa Korea.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi literatur dan dokumentasi dengan menggunakan data-data yang didapat secara *online*, serta menggunakan teknik pengumpulan data dengan mewawancarai pengamat politik dari Universitas Hankuk yaitu Prof Yang Seung-yoon. Studi literatur adalah serangkaian kegiatan untuk dengan mengumpulkan dan menelaah sejumlah data dari sumber-sumber studi terdahulu. Oleh sebab itu teknik pengumpulan studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Pada penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data literatur dan dokumen berbahasa Korean kemudian menerjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia untuk memudahkan dalam memahami data.

3.5 Teknik Analisis Data sesuaikan dengan kebutuhan penelitian kamu

Teknik analisis data adalah prosedur pengumpulan data sehingga peneliti dapat lebih mudah menarik kesimpulan atau menjawab rumusan masalah. Analisis kualitatif menafsirkan apa yang dimaksud dengan mencatat pola, penjelasan, alur sebab akibat, dan proposisi (Miles dan Huberman, 2014, hal. 22). Metode kualitatif yang bersifat induktif akan melakukan analisis berdasarkan data yang diperoleh.

Pada penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Langkah-langkah analisis data, sebagai berikut:

1. Kondensasi Data

Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan dan pemfokusan data yang muncul dalam korpus (tubuh) penuh dari catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya (Miles dan Huberman, 2014, hal. 21). Dengan mereduksi data maka peneliti akan lebih mudah mendapat gambaran yang lebih jelas. Mereduksi data juga dimaksudkan agar peneliti dapat menemukan 'keunikan' yang perlu diperhatikan dalam penelitian.

2. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data atau *display* data yaitu kumpulan informasi yang terorganisir dan terkompresi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan tindakan (Miles dan Huberman, 2014, hal. 21). Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Penyajian data dapat memudahkan peneliti untuk lebih memahami serta untuk merencanakan langkah selanjutnya yang akan diambil peneliti

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Metode kualitatif bersifat fleksibel yang artinya tidak terpaku pada suatu konsep yang direncanakan pada awal penelitian, namun bersifat terbuka dengan perubahan seiring dengan temuan data-data pada proses penelitian. Pada tahap ini penulis melakukan penarikan kesimpulan yang didukung oleh data-data yang kredibel.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pertanyaan penelitian dari tulisan ini ialah “Bagaimana perbandingan kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Jepang pada era Presiden Park Geun-hye dan era Presiden Moon Jae-in terkait isu *Comfort Women*?”. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa masing-masing pemerintahan yaitu Presiden Park dan Presiden Moon merumuskan kebijakan yang berbeda terkait isu *comfort women*.

Isu *comfort women* berkembang pada awal tahun 90-an, tepatnya ketika mantan *comfort women* bernama Kim Hak-sun memberikan testimoninya kepada publik pada tahun 1991. Masalah *comfort women* telah mengganggu hubungan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan. Korea Selatan menegaskan bahwa Jepang belum benar-benar meminta maaf, mengakui keterlibatan negaranya dalam sistem *comfort women*, dan memberikan kompensasi kepada korban. Sementara itu, Jepang memandang segala masalah sejarah dengan Korea Selatan saat ini telah diselesaikan melalui *The Treaty on Basic Relations Between Japan and the Republic of Korea 1965*.

Presiden Park Geun-hye dan Presiden Moon Jae-in sama-sama dihadapkan pada masalah *comfort women*. Isu *comfort women* menuntut penyelesaian segera karena menyangkut hubungan bilateral dengan Jepang dan usia para korban *comfort women* yang tidak lagi muda. Keduanya menginginkan adanya kesepakatan dan keadilan bagi para korban *comfort women* yang masih hidup namun dengan menggunakan kebijakan yang berbeda.

Presiden Park Geun-hye mengakhiri pertikaian dengan menggunakan kebijakan *trust politic* yaitu membuat kesepakatan dengan Jepang dalam *2015 ROK – Japan Agreement on Comfort Women*. Meskipun begitu kebijakan ini

dinilai kurang berhasil karena dianggap sebagai bentuk normalisasi hubungan Korea Selatan dan Jepang dan tidak benar-benar berpusat pada keadilan bagi korban. Sehingga Presiden Park dianggap mengabaikan kepentingan para korban dengan memilih untuk mengejar kepentingan nasional lain seperti keamanan dan perhitungan ekonomi yang dapat diwujudkan jika isu *comfort women* telah mencapai kesepakatan. Presiden Moon Jae-in menggunakan kebijakan *dual track approach*, karena Moon menyadari bahwa perlu melibatkan korban dan opini publik dalam merumuskan suatu kebijakan tetapi dengan tetap memastikan bahwa hubungan Korea Selatan dan Jepang akan berorientasi pada masa depan dengan berusaha memperkuat kerja sama diplomatik, ekonomi, dan keamanan.

Perbedaan kebijakan ini juga didasari oleh perbedaan pendekatan kebijakan luar negeri yang digunakan oleh kedua Presiden. Presiden Park Geun-hye bersikap lebih kooperatif dengan Jepang, Presiden Park menjadi presiden pertama yang berdialog langsung dengan Jepang terkait isu *comfort women*. Presiden Moon Jae-in bersikap lebih asertif dengan secara terbuka menyatakan bahwa perjanjian antar pemerintah bukan merupakan bentuk rekonsiliasi bagi korban, ia juga menyatakan penolakan kepada perjanjian tersebut walau tidak menekan Jepang untuk melakukan negosiasi ulang.

Hasil dari dua kebijakan pada tingkat domestik Korea Selatan pun berbeda. Kebijakan Park Geun-hye menghasilkan *Reconciliation and Healing Foundation* sebagai yayasan yang akan mengelola dana dari Jepang untuk para korban. Presiden Moon Jae-in yang berkonsep *victim centered*, menghasilkan sebuah gugus tugas yang dimaksudkan untuk menyelidiki *2015 ROK – Japan Agreement on Comfort Women*, hasil investigasi berujung pada pembubaran *Reconciliation and Healing Foundation*.

Adapun kebijakan kedua Presiden didukung oleh faktor pada level domestik dan internasional yang berbeda. Pada level domestik kebijakan Presiden Park Geun-hye dipengaruhi oleh karakteristik kepemimpinannya, sementara Presiden Moon Jae-in mendapat tekanan dari publik dan organisasi masyarakat untuk menolak keabsahan perjanjian tahun 2015 mengenai *comfort women*. Pada level internasional berkaitan dengan peran Amerika Serikat sebagai sekutu

penting Korea Selatan. Park Geun-hye banyak mendapat dorongan untuk melakukan rekonsiliasi dengan Jepang oleh Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Presiden Barack Obama. Ketika pemerintahan Moon Jae-in, Amerika Serikat tidak lagi aktif berperan sebagai mediator dibawah administrasi Trump.

5.2 Saran

Melalui penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti menyadari betapa pentingnya isu *comfort women* bagi publik Korea Selatan. Untuk proses rekonsiliasi yang baik, tentunya harus memprioritaskan korban mengingat angka korban yang masih hidup terus berkurang. Jepang dan Korea Selatan perlu menghadapi sejarah mereka secara jujur dan tentunya melalui proses negosiasi yang transparan dengan melibatkan korban serta kelompok masyarakat sipil.

Isu *comfort women* sendiri sangat krusial untuk diteliti karena ingatan sejarah yang selalu diteruskan dari masa ke masa dan menjadi isu penting di Korea Selatan. Peneliti menyarankan agar isu ini dapat diteliti dalam berbagai sudut pandang agar semakin memperkaya wawasan mengenai *comfort women*. Penulis juga berharap kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam tulisan ini dapat dilengkapi oleh penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bogdan, R., Sari Knopp Biklen. (2009). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories And Methods*. Boston: Pearson.
- Boyoung, P. (2016). 양면게임이론으로분석한일본군'위안부'문제협상. *Negotiation on Japanese Military Comfort Women*. Seoul: Ewha Women University.
- Breuning, M. (2007). *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*. New York: Plagrave Macmillan.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: SAGE Publication Inc.
- Dudden, A. (2015). *Japan's Colonizations of Korea: Discourse and Power*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Flick, U. (Eds.). (2013). *Qualitative Data Analysis*. London: SAGE Publition Ltd.
- Glosserman, B., Scott Snyder. (2015). *The Japan – South Korea Identity Clash*. New York: Clumbia University Press.
- Hata, I. (2018). *Comfort Women And Sex In The Battle Zone*. Maryland: Rowman & Littlefield
- Hicks, G. (1997). *The Comfort Women: Japan Brutal Regime of Enforced Prostitution in The Second World War*. New York: W. W Norton and Company.
- Hudson, V. M. (2013). *Foreign Policy Analysis: Classic & Contemporary Theory*. Maryland: Rowman & Littlefield.
- Jinhyang, K. (2007). *Comfort Women: Human Right of Women from Then and Present*. Georgia: University of Georgia Press
- Jackson, R., Georg Sorensen. (2013). *Introduction to International Relations: Theory and Approaches*. Oxford: Oxford University Press.
- Kangkyyu, L. (2017). *The Comfort Women Agreement: An Analysis of The Motivation that Led to Park Geun Hye Acquiesce*. Washington: Georgetown University.

- Kesselman, M., Joel Krieger, dan William A. Joseph. (2009). *Introduction to Comparative Politics: Political Challenges And Changing Agenda*. Boston: Wadsworth.
- Landman., T. (2008). *Issue and Method in Comparative Politic: An Introduction*. New York: Routledge.
- Miles, M., Michael Huberman, Dan Johnny Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis: Methods Sourcebook (3rd Edition)*. California: Sage Publitions
- Norma, C. (2015). *The Japanese Comfort Women and Sexual Slavery During The China and Pacific War*. London: Bloomsbury Academic.
- Steans, J., Lloyd Pettiford, dkk. (2010). *An Introduction to International Relation Theory: Perspectives And Themes*. Edinburg: Pearson
- Tanaka, Y. (2001). *Japan's Comfort Women: Sexual Salvery and Prostitution During World War II and the US Occupation*. New York: Routledge.
- Vartanian, T. (2010). *Secondary Data Analysis: Pocket Guides to Social Work Data Research*. New York: Oxford University Press.

Jurnal

- Arakawa, M. (2001). New Forum of Comfort Women: Fighting Japan in United States Court. *Berkeley Journal of Gender, Law, and Justice*. Vol. 16. No. 1.
- Argibay, C. (2003). Sexual Slavery and Comfort Women of World War II. *Berkeley Journal of International Law*. Vol. 21 No. 2.
- Chun, J. (2021). Who Decides Foreign Policy? The Role Of National Trauma In Shaping The Influence Of Public Opinion in South Korea. *Policy Studies*. Vol. 15. No. 1.
- Claudia, D. (2018). Penolakan Korban Comfort Women System Dari Korea Selatan Terhadap 2015 Japan – ROK Agreement on Comfort Women. *Jurnal Hubungan Internasional*. Vol. 7 No. 3.
- Culpepper, P. D. (2005). Single Country And Comparative Politics. *Italian Politic And Society Journal* . Vol. 2, No. 60.
- Fauzia, R. (2017). Diplomasi Korea Selatan Mendesak Jepang Menandatangani *Agreement on Comfort Women 2011-2015*. *JOM Fisip*. Vol. 4. No. 1

- Gracelia, J. Implikasi Penanganan Masalah *Comfort Women* Terhadap Hubungan Jepang dan Korea Selatan Pada Tahun 2015 – 2019. *Jurnal Hubungan Internasional*. Vol. 11 No. 21.
- Hahm, S., dan Uk Heo. (2017). The First Female President in South Korea: Park Geun-hye's Leadership and Democracy. *Journal of Asian and African Studies*. Vol. 17. No. 1.
- Haruki, W. (2008). The Comfort Women, Asian Women's Fund, And The Digital Museum. *Asia Pasific Journal*. Vol 61 No. 2.
- Hiyashi, A. (2007). Government, The Military and Businnes In Japan's Wartime Comfort Women System. *The Asia Pasific Journal*. Vol. 5 No. 1.
- Jonsson, G (2015). Can Japan – Korea Dispute on 'Comfort Women' be Resolved?". *Korean Studies*. Vol. 40 No. 3.
- Kang, David., dan Kyuri Park. (2017). On Board For A Dual Track Approach. *A Triannual E-Journal on East Asian Bilateral Relations*. Vol. 19, No. 2.
- Kumagai, N. (2016). The Background to the Japan – Republic of Korea Agreement: Compromises Concerning the Understanding of the Comfort Women Issue. *Asia – Pacific Revie*. Vol. 23 No. 1.
- Lee, E. (2015). Behind the Mask of Human Rights: Comfort Women. *Interwoven Voices Of Local And Global Identities*. Vol. 4. No. 1.
- Le, T. P. (2019). Negotiating in Good Faith: Overcoming Legitimacy Problems in Japan – South Korea Reconciliation Process. *The Journal of Asian Studies*. Vol. 78 No. 3.
- Lantis, J., Ryan Beasley. (2017). Comparative Foreign Policy Analysis. Kearsipan Universitas Oxford
- Luck, A. (2018). No Comfort in the Truth. *SAGE Journal*. Vol. 47 No. 1
- Seongyi, Y. (2017). South Korea in 2017: Presidential Impeachment and Security Volatilit. *Asian Survey*. Vol. 58 No. 01
- Puspitasari, M. (2021). Jalan Terjal Implementasi Reconciliation and Healing Foundation oleh Korea Selatan dalam Hubungan dengan Jepang. *Jurnal Hubungan Internasional*. Vol. 17. No. 1.
- Putnam, R. D. (1998). Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two Level Game. *Internasional Organisation*. Vol. 42. No. 3.
- Rozman, G. (2020). East Asian Leaders' Geopolitical Frameworks, New National Identity Impact, And Rising Economic Concerns with China. *Korea Institute of America Journal*. Vol.31. No. 1.

Soh, C. S. (200). Human Rights and the Comfort Women. *Peace Review*. Vol 1. No. 12.

Task Force on Review of Comfort Women Agreement. (2017). Report on Comfort Women Agreement. Ministry of Foreign Affairs of South Korea.

Tongshutsi, J. L. (1994). Comfort Women of World War II. *UCLA Women's Law Journal*. Vol. 4 No. 2.

Yangmo, K. (2019). Privatized Foreign Policy? Explaining Park Geun-hye Administration Decision Making. *Korea Journal*. Vol.15. No. 1.

Yonson, A. (2019). Yearning for Affection: Traumatic Bonding Between Korean 'Comfort Women' And Japanese Soldier During World War II. *European Journal of Women's Studies*. Vol. 26 No. 4.

Laman

Ahn, M. KBS NEWS. (2019, 02, 13). [팩트체크K] 위안부피해자에게성실히사과했다는일본...사실일까? (*Japan has Sincerely Apologized to Comfort Women Victims..Is It True?*). Diakses pada 8 Oktober 2021 melalui <https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=4137449>

Ankit, P. The Diplomat. (2013, 11, 05). *Park Geun Hye: Japan Summit Pointless Without Apology*. Diakses pada 9 Oktober 2021 melalui <https://thediplomat.com/2013/11/park-geun-hye-japan-summit-pointless-without-apology/>

Deutsche Welle. (2019, 01, 09). South Korean minister says Seoul not seeking renegotiation of 'comfort women' deal with Japan. Diakses pada 5 Juni 2022 melalui <https://www.dw.com/en/south-korean-minister-says-seoul-not-seeking-renegotiation-of-comfort-women-deal-with-japan/a-42075602>

Eilperin, J. The Washington Post. (2016, 09, 01). Agreement on Comfort Women Offers Strategic Benefit on US in Asia Pacific. Diakses pada 13 Oktober 2021 melalui https://www.washingtonpost.com/politics/agreement-on-comfort-women-offers-ancillary-benefit-to-us-in-asia-pacific/2016/01/09/41a03d84-b54c-11e5-a842-0feb51d1d124_story.html?utm_term=.11939cf3a262

Gallup. (2016, 01, 01). 데일리오피니언제193호(2016년 1월 1주) - 총선지지정당, 위안부문제합의(Political Parties Supporting The General Election, Agree On The Issue Of Comfort Women). Diakses pada 16 oktober 2021 melalui <http://www.gallup.co.kr/gallupdb/reportContent.asp?seqNo=720&pagePos=18&selectYear=&search=&searchKeyword=>

Gyeongsamnando Office of Education. 일본군 ‘위안부’역사(*The History of Japanaese Military Comfort Women*). Diakses pada 7 Oktober 2021 melalui https://www.gne.go.kr/index.gne?menuCd=DOM_000000154002002000

Jeon, C. The Korea Herald. (2014, 03, 23). Park Departs For Hague For Nuclear Conference. Diakses pada 25 Mei 2022 melalui <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20140323000241>

Jihoon, K. Yeonhap. (2018, 03, 08). 아시아위안부피해자들 “여성을 짐승 취급한 일본 사죄해야” (*Asian Comfort Women Victims "Japan Should Apologize For Treating Women As Animals"*). Diakses pada 16 Oktober 2021 melalui <https://www.yna.co.kr/view/AKR20180308093200004>

JoonHyung, J. Yeonhap. (2017, 12, 27). 박근혜정부 '위안부이면합의' 숨겼다... "합의비공개부분 존재" (*The Park Geun-Hye Administration Hid The 'Comfort Women' Agreement... " There Is A Non-Disclosure Part Of The Agreement*). Diakses pada 14 Oktober 2021 melalui <https://www.yna.co.kr/view/AKR20171227088400014>

Jung, I, H. HANKYOREH. (2016, 11, 23). Despite criticism, South Korea signs GSOMIA with Japan. Diakses pada 25 Mei 2022 melalui https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/771627.html

Jung, M. Korea Herald. (2017, 12, 28). *Moon Decries 2015 Korea-Japan Comfort Woman deal as Flawed*. Diakses pada 13 Oktober melalui <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20171228000905>

Kang, H, M. The Diplomat. (2018, 11 27). *South Korea Decides to Dismantle Comfort Women Reconciliation and Healing Foundation*". Diakses pada 4 Januari 2021 melalui <https://thediplomat.com/2018/11/south-korea-decides-to-dismantle-comfort-women-reconciliation-and-healing-foundation/>

Kang, J. Yeonhap. (2018, 11, 28). 화해치유재단해산결정...정부 "즉시법적절차"(종합) (*The reason for the decision to disband the Reconciliation and Healing Foundation revealed by the Ministry of Gender Equality and Family*). Diakses pada 14 Oktober 2021 melalui <https://www.yna.co.kr/view/AKR20181121060000005>

- Kim, J. HANKYOREH. (2017, 08, 16). President calls for two-track approach in South Korea-Japan relations. Diakses pada 28 Mei 2022 melalui https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/807056.html
- Kim, K. BBC NEWS. (2015, 12, 28). *Comfort Women: Korea and Japan Hail Agreement*. Diakses pada 11 Oktober 2021 melalui <https://www.bbc.com/news/world-asia-35190464>
- Kim, M. Yeonhap. (2020, 08, 14). *Moon Vows 'Victim-Centered' Solution to Row With Japan Over Comfort Women*. Diakses pada 14 Oktober 2021 melalui <https://en.yna.co.kr/view/AEN20200814003400315>
- Kim, M., Kim, J. HANKYOREH. (2016, 10, 15). Government begins cash payments to former comfort women. Diakses pada 7 Juni 2022 melalui https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/765828.html
- Klinger, B., Park. J. H., Terry. S. Brookings, (2019, 12, 18). *Trump Shakedowns are Threatening Two Key US Alliances In Asia*. Diakses pada 16 Oktober 2021 melalui <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/12/18/trump-shakedowns-are-threatening-two-key-u-s-alliances-in-asia/>
- Kwangsoo, P. The JoongAng News. (2017, 06, 19). 정대협, 靑하승창수석에한일위안부합의재협상요구(Jeongdaehyeop Demands Renegotiation of Comfort Women Agreement Between Korea and Japan). Diakses pada 16 oktober 2021 melalui <https://www.joongang.co.kr/article/21680478#home>
- Kwon, J. CBS NEWS. (2015, 08, 12). *South Korea Japan Reach Deal Over Comfort Women*. Diakses pada 11 Oktober 2021 melalui <https://www.cbsnews.com/news/south-korea-japan-reach-deal-over-world-war-2-comfort-women/>
- Lee, J. VOA NEWS. (2019, 07, 29). Engel Calls for Trump's Mediation in Seoul-Tokyo Trade Dispute. Diakses pada 16 Juni 2022 melalui https://www.voanews.com/a/east-asia-pacific_engel-calls-trumps-mediation-seoul-tokyo-trade-dispute/6172846.html
- Lee, J. 한겨레. (2016, 11, 22). [단독] 외교장관 “추가협상” 목살... 박대통령 ‘위안부합의’ 강행 ([Exclusive] Foreign Minister Ignoring “Additional Negotiations”... President Park enforces ‘comfort women agreement’). Diakses pada 5 Juni 2022 melalui <https://www.hani.co.kr/arti/politics/defense/771381.html>

- Lee, M. THE ASAN FORUM. [29-07-2017]. Moon Jae-in's "Two-track" Japan Policy: Prospects for Success. Diakses pada 4 Juni 2022 melalui <https://theasanforum.org/moon-jae-ins-two-track-japan-policy-prospects-for-success/>
- McCurry, J. The Guardian. (2016, 02, 18). South Korea warns Japan over 'comfort women' accord after claims of no proof. Diakses pada 2 Juni 2022 melalui <https://www.theguardian.com/world/2016/feb/18/south-korea-warns-japan-comfort-women-accord-claims-of-no-proof>
- Meng, Y. Xinhua News. (2017, 07, 31). *South Korea Launch Task Force to Review Comfort Women Agreement with Japan*. Diakses pada 14 Oktober 2021 melalui http://www.xinhuanet.com/english/2017-07/31/c_136488539.htm
- Miller, B. Foreign Affairs. (2016, 01, 12). *No Grand Bargain: Japan and South Korea After the 'Comfort Women' Deal*. Diakses pada 13 Oktober 2021 melalui <https://www.foreignaffairs.com/articles/northeast-asia/2016-01-12/no-grand-bargain>.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2015, 12, 28). Japan's Efforts on the Issue of Comfort Women. Diakses pada 7 Juni 2022 melalui https://www.mofa.go.jp/policy/postwar/page22e_000883.html
- Ministry of Gender Equality and Family of South Korea. (2017, 12, 27). 여성가족부, 「화해·치유재단」 점검결과등발표. Diakses pada 3 Juni 2022 melalui http://www.mogef.go.kr/nw/enw/nw_enw_s001d.do?mid=mda700&bbtSn=705770
- Oh, Y, J. The Korea Times. (2010, 01, 10). *Ex-Comfort Women Hold 900th Protest*. Diakses pada 9 Oktober 2021 melalui http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2010/01/117_58780.html
- Onishi, N. The New York Times. (2007, 03, 27). *In Japan, a Historian Stand by Proof of Wartime Sex Slavery*. Diakses pada 7 Oktober 2021 melalui <https://www.nytimes.com/2007/03/31/world/asia/31yoshimi.html>
- Park, S. 동아일보. (2019, 05,16).[단독]매달생활비받지만... 위안부할머니 '텅빈통장'([Exclusive] I get monthly living expenses, but... Comfort women grandmother 'empty bankbook' tears). Diakses pada 4 Juni 2022 melalui <https://www.donga.com/news/article/all/20190516/95545146/1>

- Rossi, E. Institute of Security and Development Policy. (2017, 05 03). *South Korea's Presidential Election: Candidates and Key Policies*. Diakses pada 6 Januari 2021 melalui <https://isdpeu.org/south-koreas-presidential-election-candidates-key-policies/>
- Ruiz, E. The Diplomat. (2020, 01 10). *Before #MeToo There Were the Comfort Women*. Diakses pada 4 Januari 2021 melalui <https://thediplomat.com/2020/01/before-metoo-there-were-the-comfort-women/>
- Shin, H. The Korea Herald. (2017, 03, 01). Seoul faces dilemma over 'comfort women' statue in Busan. Diakses pada 25 Mei 2022 melalui <https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20170103000764>
- Sieg, L. REUTERS. (2014, 03, 14). *Abe Says Won't Alter 1993 Apology on Comfort Women*. Diakses pada 11 Oktober 2021 melalui <https://www.reuters.com/article/us-japankorea/japans-abe-says-wont-alter-1993-apology-oncomfort-women-idUSBREA2D04R20140314>
- Synder, S. Council on Foreign Relations. (2015, 08,11). South Korea, Japan, and Wartime Shadow. Diakses pada 8 Oktober 2021 melalui <https://www.cfr.org/expert-brief/south-korea-japan-and-wartime-shadows>
- The Korea Herald. (2017, 02, 17). 70% Of People Call For Renegotiation Of Seoul-Tokyo Deal On 'Comfort Women'. Diakses pada 31 Mei 2022 melalui <http://m.koreaherald.com/view.php?ud=20170217000552>